

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui perundang-undangan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi yang mempunyai berbagai ragam tujuan. Aktivitas di dalam sebuah organisasi selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap organisasi baik organisasi perusahaan, organisasi sosial maupun organisasi pemerintah mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut dan yang paling berperan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah sumber daya manusia atau pegawainya.

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena pelaksanaan kegiatan organisasi akan lebih efektif dan efisien jika kinerja pegawainya baik.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi sektor publik yang pada umumnya memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi swasta, dalam organisasi sektor publik dalam mencapai misi, tujuan, dan programnya menganut

prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan menempatkan masyarakat sebagai *stakeholder* yang harus dilayani secara optimal. Dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu perantara pemerintah dalam kewajibannya untuk melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Fungsi negara yang mendukung pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) tidaklah muncul seketika, namun lahir seiring perkembangan masyarakat dan pergeseran menuju negara demokratis yang berdasarkan hukum dan melindungi hak-hak warga negara.

Dinas Perikanan Kabupaten Bangka merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang beralamatkan JL. Ahmad Yani, Karya Makmur, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka. Isu tentang kinerja pegawai pemerintah selalu menjadi sorotan publik, masyarakat menuntut pemerintah agar dapat mengelola dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan hal inilah yang menjadikan Dinas

Perikanan Kabupaten Bangka berbenah terutama untuk memperbaiki kualitas kinerja pemerintah itu sendiri.

Peningkatan kualitas kinerja OPD perlu dilakukan untuk menjamin kepuasan masyarakat sebagai *stakeholder* terhadap kinerja OPD. Hal ini dikarenakan untuk menimbulkan rasa kepercayaan publik terhadap setiap OPD. Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*.

Good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara (Uar, 2016). Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Selain *good governance*, dan penegndalian internal, *budgeting* juga merupakan faktor yang penting dalam pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas kinerja OPD.

Maharani, dkk (2015) Pengendalian internal dirancang dan dipengaruhi oleh dewan entitaas direksi, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas dalam kategori berikut: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukuman peraturan yang berlaku. Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapat keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Dari pengertian para ahli bahwa sebuah pengendalian internal digunakan untuk membantu memantau kegiatan-kegiatan di

dalam lingkup perusahaan. Dengan adanya kegiatan pemantauan diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja pegawai, sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Fatoni dan Nurhayati (2013) menyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan menjamin kesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sumber daya yang terbatas, dan anggaran merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga pemerintah. Anggaran diharapkan dapat dipergunakan untuk menjalankan program atau kegiatan yang telah dibuat secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Berdasarkan konsep pemikiran yang tertuang dalam latar belakang, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul: **“Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance, Dan Budgeting Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?
2. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?
3. Apakah *Budgeting* berpengaruh dalam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Untuk membuktikan pengaruh *good governance* terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Untuk membuktikan pengaruh *Budgeting* terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kontribusi pengembangan studi ekonomi, guna memberi pengetahuan dan mengembangkan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengendalian internal, *good governance*, dan *Budgeting* terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?
2. Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pegawai pada dinas kelautan dan perikanan sungailiat akan pentingnya mengoptimalkan pengendalian internal, pengaruh *good governance* dan *Budgeting* terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)? Terutama dinas perikanan kabupaten bangka.
3. Kontribusi Kebijakan Penelitian ini dapat di jadikan masukan dan tambahan informasi mengenai pengaruh pengendalian internal, *good governance*, dan *Budgeting* terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)? Serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai teori yang melandasi penelitian ini yakni teori tentang pengendalian internal, *good governance*, *budgeting* serta kinerja instansi pemerintah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, skala pengukuran, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis data, dan model pengujian hipotesis.